

**ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN
DI KOTA SOLOK TAHUN 2007-2010**

TESIS

Oleh :

MELDAYENI
BP. 1021206031



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2011

ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN DI KOTA SOLOK TAHUN 2007-2010

Oleh : Meldayeni

(Di bawah bimbingan Dr.Werry Darta Taifur, SE.MA dan
Dr.Hefrizal Handra, MSoc.Sc)

RINGKASAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk menunjang pembangunan nasional, yang diarahkan untuk menciptakan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pentingnya peran kesehatan dalam pembangunan suatu negara dan daerah menghendaki pembangunan bidang kesehatan dilakukan secara terencana, terarah, komprehensif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di Kota Solok selama tahun 2007-2010, pencapaian derajat kesehatan masyarakat serta kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di Kota Solok. Analisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di Kota Solok dilakukan dengan membuat matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran (MKPP) program-kegiatan bidang kesehatan melalui integrasi antara dua dokumen, yakni: Integrasi RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan KUA, KUA dengan PPAS, RKPD dengan APBD dan PPAS dengan APBD. Pencapaian derajat kesehatan masyarakat berdasarkan indikator kinerja bidang kesehatan dalam dokumen RPJMD Kota Solok Tahun 2006-2011 dan Indikator Indonesia Sehat berdasarkan Kepmenkes Nomor 202/Menkes/SK/VIII/2003 dalam mewujudkan Solok Sehat Tahun 2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun masih terdapat ada program dan kegiatan yang tidak konsisten, namun secara umum antar dokumen telah menunjukkan tingkat konsistensi cukup baik. Konsisten untuk anggaran bidang kesehatan antara PPAS dengan APBD di Kota Solok cukup baik dengan tingkat deviasi anggaran yang terjadi sangat kecil yaitu berkisar <10%. Untuk pencapaian derajat kesehatan masyarakat di Kota Solok 90% dari semua indikator kesehatan

telah melebihi target yang ditetapkan Artinya untuk bidang kesehatan Pemerintah Kota Solok benar-benar memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatannya untuk pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di Kota Solok kebijakan yang dapat dilakukan adalah mempercepat dalam membuat dan menyelesaikan dokumen perencanaan lima tahunan, peningkatan intensitas informasi dan komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, meningkatkan SDM perencana dalam membuat setiap kegiatan yang diajukan dan meningkatkan pengetahuan aparatur yang terkait dalam penyusunan anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hal yang menjadi komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini berarti suatu kewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat adalah investasi (Menkes, 2006).

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk menunjang pembangunan nasional, yang diarahkan untuk menciptakan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan dapat berjalan dengan baik. Penduduk juga merupakan motor penggerak pembangunan sehingga tidak bisa dilepaskan peranannya dalam pembangunan daerah. Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk juga bertindak sebagai objek, dimana ia akan

menjadi salah satu target dalam setiap proses pembangunan (Bratakusumah, 2005:146).

Pembangunan kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan berdampak positif terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan bidang kesehatan dapat dilakukan secara terencana, terarah, komprehensif dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan perencanaan sebagai pedoman dan pemberi arah dalam pembangunan kesehatan.

Di Kota Solok pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu misi Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas agenda pembangunan dalam dokumen perencanaan baik itu dalam dokumen perencanaan tahunan maupun dokumen perencanaan jangka menengah. Hal ini sehubungan dengan keinginan dari Pemerintah Kota untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan Kota Solok Sehat 2010 sebagai pencapaian tujuan Indonesia Sehat. Disamping itu, tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan, yang memiliki tenggat waktu (2015). MDGs merupakan komitmen nasional dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan lingkungan. Upaya percepatan pencapaian target MDGs khususnya untuk bidang kesehatan menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergis kebijakan perencanaan dari tingkat Pusat hingga Daerah. (Buku Saku MDG's, 2011)

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Solok dalam bidang kesehatan tersebut diperlukan optimalisasi penyelenggaraan dalam perencanaan dan penganggaran. Pentingnya peranan perencanaan pembangunan menjadi bagian yang tak terhindarkan sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program dan kegiatan yang secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati bersama. Sementara itu perencanaan pembangunan bidang kesehatan dalam bentuk program, kebijakan maupun kegiatan akan tinggal sebagai dokumen yang sia-sia jika tidak dikaitkan dengan penganggarnya, ini disebabkan arena anggaran merupakan bagian yang sangat penting untuk merealisasikan rencana dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun di sisi lain, keterbatasan anggaran semakin menuntut adanya perencanaan yang matang agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia benar-benar dilakukan secara efektif dan efisien (Mulyati, 2010).

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Pasal 153 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa salah satu tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Permasalahan yang sering muncul adalah dokumen perencanaan belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kegiatan tahunan, sehingga antara program dan kegiatan yang direncanakan tidak konsisten dengan program dan kegiatan yang dianggarkan. Program dan kegiatan yang direncanakan idealnya sama dengan program dan kegiatan yang dianggarkan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dianalisis tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Solok yang akan disajikan dalam tulisan yang berjudul *“Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan di Kota Solok Tahun 2007-2010”*.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan di bidang kesehatan yang telah ditetapkan, diperlukan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa antara perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi dan sinkron satu sama lain, perencanaan yang telah disusun harus didukung oleh penganggaran dan dalam penyusunan anggaran harus konsisten dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya,

agar terwujudnya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Namun beberapa hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa pada sebagian besar pemerintah daerah selama ini dalam penyusunan anggaran mengabaikan dokumen perencanaan yang ada, sehingga tidak tercapainya sasaran pembangunan.

Dari latar belakang permasalahan diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran bidang kesehatan di Kota Solok serta alasan yang menjadi penyebab apabila terjadi ketidakkonsistenan.
- b. Bagaimana pencapaian derajat kesehatan masyarakat di Kota Solok.
- c. Kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan sehingga tercapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran bidang kesehatan di Kota Solok serta sebab-sebab apabila terjadi ketidakkonsistenan.
- b. Menganalisis pencapaian derajat kesehatan masyarakat di Kota Solok.
- c. Menyusun implikasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

- a. Memberikan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kota Solok, sekaligus dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang dalam hal menyusun perencanaan dan penganggaran untuk bidang kesehatan di Kota Solok.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan para peneliti yang berminat mengadakan penelitian mengenai perencanaan dan penganggaran khususnya untuk bidang kesehatan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca atau peneliti lain yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Solok dengan melakukan analisa terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan yang dilihat melalui program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011 (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok empat tahun terakhir (2007-2010) yang diformulasikan dengan Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP). Sementara itu pencapaian derajat kesehatan masyarakat di Kota Solok digunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan sasaran bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat yang ada dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah dan indikator derajat kesehatan untuk Kota Solok Sehat 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010. Selanjutnya berdasarkan analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran, dan analisis deskriptif disusunlah implikasi kebijakan yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran di bidang kesehatan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan penelitian, diantaranya:

- a. Penelitian ini ditujukan pada perencanaan dan penganggaran dalam 4 (lima) Tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2007-2010. Tahun Anggaran 2007 merupakan tahun pertama Pemerintah Kota Solok mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- b. Program dan kegiatan yang menjadi objek penelitian adalah mengenai program dan kegiatan untuk bidang kesehatan di Kota Solok.
- c. Dokumen KUA, PPAS dan APBD yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen setelah dilakukannya perubahan karena program dan kegiatan dalam dokumen tersebut yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Analisis pencapaian derajat kesehatan berdasarkan sasaran bidang kesehatan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2006-2011 dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Indikator derajat kesehatan untuk Kota Solok Sehat 2010 berdasarkan Indonesia Sehat 2010.

- e. Sasaran bidang kesehatan dalam RPJMD Pemerintah Kota Solok Tahun 2006-2011 dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Solok adalah Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Prevalensi Gizi Kurang Anak Balita.
- f. Indikator derajat kesehatan berdasarkan Indonesia Sehat 2010, terdiri atas Mortalitas, morbiditas dan status gizi.

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian

Penulisan terdiri dari 7 bab yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

- BAB I : Menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian.
- BAB II : Berisi tinjauan pustaka, yaitu mengenai teori, definisi, konsep, pengertian dan arti penting perencanaan, anggaran dan kesehatan.
- Bab III : Membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi : kerangka analisis, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis, definisi konsep dan definisi operasional
- Bab IV : Membahas tentang kondisi umum daerah penelitian, visi dan misi kepala daerah periode 2005-2010, pendapatan dan belanja daerah serta gambaran umum tentang kesehatan lokasi penelitian.
- Bab V : Berisi tentang hasil dan pembahasan
- Bab VI : Berisi mengenai implikasi kebijakan
- Bab VII : Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran untuk bidang kesehatan di Kota Solok tahun 2007-2010, berdasarkan analisis konsistensi antar dokumen dengan menggunakan Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran dapat disimpulkan bahwa antar dokumen telah menunjukkan tingkat konsistensinya yang cukup baik. Artinya untuk bidang kesehatan Pemerintah Kota Solok benar-benar memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatannya untuk pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Dalam penelitian masih terdapat ada program dan kegiatan yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan setiap tahunnya disebabkan karena :
 - (a) Lambatnya penyelesaian dan pengesahan RPJMD tahun 2006-2011,
 - (b) Keluarnya peraturan baru dalam pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, (c) Adanya Dana Alokasi Khusus yang diterima dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan didaerah, (d) Adanya program baru yang merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, (e) Adanya kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang sama.

3. Selama tahun 2007-2010 tingkat deviasi anggaran yang terjadi antara PPAS dengan APBD sangat kecil yaitu berkisar <10% dan hanya terjadi pada 1 kegiatan tahun 2007, 2008 dan 2010, dan 6 kegiatan pada tahun 2009. Pada tahun 2009 ditemukan tingkat deviasi 10-20% dan 2010 tingkat deviasi 22,87% pada satu kegiatan. Secara umum tingkat konsisten anggaran untuk bidang kesehatan di Kota Solok cukup baik.
4. Pencapaian untuk derajat kesehatan masyarakat di Kota Solok yang merupakan sasaran untuk bidang kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2006-2011, menunjukkan dari 4 indikator yaitu : Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Prevalensi Gizi Kurang Anak Balita, terdapat 1 indikator (Usia Harapan Hidup) yang belum tercapai sarannya hanya 96,84%. Adanya peningkatan derajat kesehatan menunjukkan terjadinya perbaikan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Berarti konsistensi antara program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan telah dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Solok Tahun 2006-2011 untuk bidang kesehatan menampakkan hasilnya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan .
5. Pencapaian Kota Solok Sehat 2010 untuk indikator derajat kesehatan menunjukkan dari seluruh Indikator derajat Kesehatan kecuali Prevalensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko), hanya 1 indikator yaitu Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per-100.000 penduduk yang belum dicapai, sedangkan indikator lainnya telah melebihi target yang

ditetapkan untuk Indonesia Sehat 2010. Artinya Solok Sehat 2010 telah menunjukkan keberhasilannya. Hal ini disebabkan BDB merupakan penyakit yang mudah menular, yang penyebarannya sangat mudah. Kota Solok Sehat 2010 telah menunjukkan keberhasilannya karena 90% indikator derajat kesehatan telah tercapai. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap peningkatan pencapaian indikator derajat kesehatan untuk Kota Solok Sehat 2010.

7.2 Rekomendasi

Terhadap beberapa persoalan yang ditemukan dari hasil penelitian, untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, bidang kesehatan di Kota Solok maka dapat direkomendasikan: mempercepat dalam membuat dan menyelesaikan dokumen perencanaan lima tahunan RPJMD Pemerintah Kota Solok setelah terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota, peningkatan intensitas informasi dan komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, meningkatkan SDM perencana dalam membuat setiap kegiatan yang diajukan dan meningkatkan pengetahuan aparatur yang terkait dalam penyusunan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi daerah , BPFE, Yogyakarta
- A.W Widjaja, 1995, Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, Manajemen PT.Grafindo Persada, Jakarta
- , 2004, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, Penerbit Pt.Grafindo Persada, Jakarta
- Bunglin, Buehan, 2005, Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bratakusumah dan Riyadi, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah "Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008, Pedoman Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/kota, Jakarta
- Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3, 2005, Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis kinerja, Jakarta
- Eprienti, Lelis, 2006, Analisis Tingkat Konsistensi Program dalam Restrada dan APBD Kota Sawahlunto, Tesis Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas
- Elfindri, 2001, Ekonomi Sumber Daya Manusia, Penerbit Universitas Andalas, Padang
- , 2003, Ekonomi Layanan Kesehatan, Penerbit Universitas Andalas, Padang
- , 2008, Strategi Sukses Membangun Daerah, Penerbit Gorga Media
- Institute For Civil Strengthening (ICS), 2009, Apbd 2008 Tidak Memenuhi Kelayakan, Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua
- Jhingan, M.L, 2007. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kunarj, 2002, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, UI Press, Jakarta

- Kuncoro, Mudrajat, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta
- , 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta
- , 2002, Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah, Jurnal Ekonomi Rakyat (Artikel-Th.1-Nomor 4-Juni 2002)
- Mulianto, dkk, 2004. Penelitian optimalisasi Kemampuan Daerah Kabupaten/kota dalam Melaksanakan Otonomi Daerah, Balitbang Prov. Jawa Tengah
- Mulyati, S.Endang, 2010, Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bdad Pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009, Tesis Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia
- Musgrave, Richard dan Peggi, 1991. Keuangan Negara dan Daerah, Jakarta, Erlangga.
- Nazir, Moh, 2003, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/KES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota

Pemerintah Daerah Kota Solok, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Pemerintah Daerah Kota Solok periode 2006-2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Solok, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Solok, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Solok Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Solok, PPAS Kota Solok Tahun 2007-2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Solok, Perubahan APBD Kota Solok Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Solok, Kota Solok Dalam Angka Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Solok, Profil Kota Kesehatan Kota Solok Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011, Dinas Kesehatan.

Pemerintah Daerah Kota Solok, Profil Kota Solok Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik : Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta

Syafrizal, 2009, Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Penerbit Baduose Media, Padang

Sinaga, Murbanto, 2004, Realita Perencanaan dan Anggaran, Departemen Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara

Suwandi, Made, 2002, Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta

Suyatno, Ukuran-Ukuran dalam Kesehatan dan Epidemiologi, Universitas Diponegoro

Usodo, G.Wisnu, 2008, Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Temanggung Kasus : Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, Tesis Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas

Utama, Surya, 2004, Upaya Menghadapi Masalah Kesehatan di Masa Depan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara

Buku Saku MDG's